

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Negara berkembang harus mengambil langkah substansial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan meningkatkan kualitas individu manusia untuk meningkatkan produktivitasnya (Elfindri dan Nasri, 2004). Karena lebih banyak kegiatan dan aspek ekonomi yang dapat dioptimalkan oleh tenaga kerja ini, sumber daya manusia yang produktif mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Cahyono, 2019). Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pendidikan, baik pendidikan formal, informal dan berbagai keterampilan. Dalam hal ini melek huruf dan rata-rata lama sekolah bisa menjadi patokan keberhasilan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di samping aspek kesehatan dan ekonomi (Hastarini, 2005).

IPM digunakan untuk mengukur paradigma pembangunan saat ini dengan cara menilai kualitas hidup manusia diukur dari kualitas pendidikan, kesehatan dan status ekonomi. Perbaikan pada ketiga indikator tersebut seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mirza, 2012).

Indeks Pembangunan Manusia dibangun di atas kerangka tiga dimensi, yang meliputi pengetahuan, hidup yang layak, umur panjang dan sehat. Karena terkait dengan begitu banyak variabel, termasuk harapan hidup saat lahir, yang dipakai dalam mengukur elemen kesehatan. Selain itu, dimensi pengetahuan dinilai dengan menggabungkan indeks harapan lama sekolah, dengan indeks daya beli kebutuhan dasar, yang merupakan tingkat rata-rata pengeluaran per kapita. Pendekatan ini sering digunakan dalam ukuran pendapatan untuk menyampaikan manfaat pembangunan untuk kehidupan yang layak (BPS, 2020).

Keberadaan IPM sebagai pengembangan keterampilan manusia melalui pemanfaatan tingkat kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan/keterampilan. Berbeda pembangunan manusia, di sisi lain, berfokus pada produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan (Manik, 2020).

Pembangunan nasional Indonesia memperkuat hal tersebut melalui pembangunan manusia, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup fisik, mental, dan spiritual (Elfindri dan Nasri, 2004). Pergeseran paradigma sepuluh tahunnya dari tahun 2000 menunjukkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat pembangunan nasional (Azahari, 2000) ditambah pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia (UNDP, 1995).

Pertumbuhan merupakan suatu pergerakan positif dan juga meningkatnya perekonomian suatu negara yang bisa dinilai melalui kenaikan output. Sementara itu pertumbuhan yang berkesinambungan bisa juga diartikan dengan kenaikan output yang dialami dalam jangka panjang dengan memiliki kekayaan sumber daya yang juga tersedia selalu ketika diperlukan. Pertumbuhan yang terjadi terus menerus dapat disebut sebagai pembangunan berkesinambungan secara ideal dipopulerkan oleh the *World Commission on Enviromental and Development* (WCED) 1987. Komisi tersebut mengedarkan laporan dengan judul “*Our Common Futures*”. Laporan cukup populer ini disusun bersama-sama dengan kelompok ahli yang diketuai Harlem Brundtland. Dengan demikianlah laporan ini lebih umum diketahui dengan nama Laporan Brundtland ataupun *The Brudtland Repot*. Pembangunan jangka panjang pada laporan tersebut diartikan dengan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan pada masa itu tanpa perlu memperkecil peluang untuk generasi yang akan datang agar dapat mencukupi kebutuhannya.

Perolehan Indonesia pada sektor migas konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 juga 2012 Indonesia menghasilkan pendapatan dengan nominal USD 35,79 M juga USD 36,13 M, jauh diatas target APBN yang sudah disepakati yaitu USD 32,40 M dan USD 33,48 M. dalam jangka waktu tiga tahun berikutnya, walaupun berdasarkan hitungan persen pencapaian target mengalami penurunan, kontribusi migas terhadap perekonomian Negara tetap terbilang sangat tinggi. Hal tersebut membuktikan peranan sektor migas sejauh ini sudah memberi kontribusi berpengaruh besar dan strategis untuk pembangunan

nasional (ESDM, 2016). Berdasarkan kedudukan penggunaan sumber daya alam, pembangunan jangka panjang juga berarti kenaikan produksi tanpa mengabaikan efek yang ditimbulkan bagi lingkungan. Dengan begitu sumber daya yang dimanfaatkan kegunaannya dapat bertahan lama dan dapat membantu kenaikan pembangunan ekonomi secara terus menerus (Saragih, 2000).

Provinsi Riau merupakan wilayah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, penyumbang sepertiga dari produksi minyak mentah nasional. Provinsi Riau mampu menghasilkan 365.827 barel setiap harinya. Di samping minyak, sumber daya alam gas juga dapat ditemukan di Provinsi Riau. Hampir sebagian besar wilayah yang mempunyai sumber minyak bumi terdapat juga cadangan gas di wilayah tersebut. Dengan demikian hasil tambang minyak dan gas ini menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Riau. Saudara Harun (2000) sang pembimbing akademik pada Universitas Riau memberikan pendapat yang juga selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu. pada penelitian saudara Harun memberikan kesimpulan yaitu Riau adalah Provinsi penghasil minyak mentah paling besar yang ada di Indonesia, perekonomian Riau mempunyai dependensi tinggi pada hasil dari sektor migas.



Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) tahun 2019

PROVINSI	PDRB
Aceh	164 211
Sumatera Utara	801 733
Sumatera Barat	246 423
Riau	765 198
Jambi	217 712
Sumatera Selatan	455 233
Bengkulu	72 143
Lampung	360 664
Kep. Bangka Belitung	75 829
Kep. Riau	268 080

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dapat kita lihat bahwa pada Pulau Sumatera Provinsi Riau menduduki PDRB ADHB tertinggi kedua setelah Provinsi Sumatera Utara, dengan PDRB ADHB Riau sebesar 765 198 (Miliar) dan Sumatera Utara sebesar 801 733 (Miliar).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Dengan jumlah 3.396.803 (jiwa) penduduk dan Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Sebesar Rp 2.816.085,42/Jiwa Riau mampu menjadi provinsi terkaya di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera barat dengan jumlah penduduk 5.441.197 (jiwa) dan rata-rata upah/ gaji sebesar Rp. 1.968.506,00/jiwa. Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 7.296.324 jiwa dan rata-rata upah/gaji sebesar Rp.2.474.755/jiwa.

Peran Sektor Pertambangan akan memberikan kontribusi yang baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dalam bentuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah. Hal ini dijelaskan oleh Hidayat (2014), Yeni (2019).Ashari (2020), Wahyuningsih (2019), Dwiky (2020) dan Sukri (2020).

Dengan kekayaan hasil tambang yang dimilikinya, Provinsi Riau dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan masyarakat di Provinsi Riau dan beberapa Provinsi sekitarnya.

Tabel 1.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun), 2020.

Kelamin	laki-laki	Perempuan
Aceh	68,04	71,91
Sumatera Utara	67,22	71,08
Sumatera Barat	67,59	71,45
Riau	69,75	73,55
Jambi	69,27	73,07
Sumatera Selatan	68	71,86
Bengkulu	67,47	71,27
Lampung	68,78	72,61
Kep.Bangka Belitung	68,77	72,59
Kep. Riau	68,08	71,9

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut data BPS tahun 2020, Provinsi Riau memiliki Angka Harapan Hidup lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi sekitarnya yaitu sebesar 69,75 (tahun) untuk laki-laki dan 73,55 (tahun) untuk perempuan. Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki peringkat AHH rendah dengan angka 67,22 (tahun) untuk laki-laki dan 71,08 (tahun) untuk perempuan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Pertambangan atau sumber daya alam memiliki pengaruh terhadap angka Angka Harapan Hidup suatu daerah. Berdasarkan data BPS kita simpulkan bahwasannya Provinsi Riau menjadi Provinsi dengan Angka Harapan Hidup yang tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi tetangga yang ada, hal ini salah satunya terjadi karena produktivitas kesejahteraan masyarakatnya yang baik dimana sektor industri dan fasilitas yang maju baik disediakan oleh kawasan industri maupun pemerintahnya sendiri, hal ini tercermin dari Provinsi Riau yang menjadikan sektor Industri sebagai tiang utama pemasukan daerahnya dan lapangan pekerjaan yang baik diminati dan mendukung disini adalah sektor industri.

Dari bidang pendidikan data BPS menunjukkan bahwa Riau juga memiliki nilai cukup tinggi dalam Harapan Lama Sekolah yang berarti sektor pertambangan memberikan dampak yang signifikan terhadap Provinsi

Tabel 1.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi (Tahun), 2020

PROVINSI	HLS
Aceh	14,3
Sumatera Utara	13,15
Sumatera Barat	14,01
Riau	13,14
Jambi	12,93
Sumatera Selatan	12,39
Bengkulu	13,59
Lampung	12,63
Kep. Bangka Belitung	11,94
Kep. Riau	12,83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Riau. Tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Riau dengan nilai 13,14 (Tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Seletah dengan nilai 12,39 (Tahun), Jambi dengan nilai 12,93 (Tahun), Lampung dengan nilai 12,63 (Tahun), Kep. Bangka Belitung dengan nilai 11.94 (Tahun) dan Kep. Riau dengan nilai 12,83 (Tahun). Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dengan nilai 14,30 (Tahun), dan Sumatera Utara dengan nilai 13,15 (Tahun) , Sumatera Barat dengan nilai 14,01 (Tahun) dan Bengkulu dengan nilai 13,59 (Tahun) yang bukan daerah penghasil minyak maka Riau berada posisi di bawah.

Provinsi Riau jauh lebih maju dari provinsi yang penulis bandingkan, hal ini dikarenakan pada Provinsi Riau hampir seluruh perekonomian bergerak di sektor industri yang sebagian besar bergerak pada sektor minyak dan gas, yang menjadikan pendapatan asli daerah Provinsi Riau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang hanya ditunjang sebagian besar dari sektor pertanian.

Dari indikator aspek kesehatan dan perekonomian Provinsi Riau lebih unggul dari provinsi lain di sekitarnya. Namun dibidang pendidikan Riau tidak unggul jika dibandingkan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera .

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan antara sektor pertambangan dan energi dengan IPM beberapa daerah di Riau dengan

judul“Analisis Peran Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Migas terhadap IPM bidang pendidikan pada Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap IPM bidang pendidikan pada Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Migas terhadap IPM bidang pendidikan pada Provinsi Riau
2. Untuk mengkaji pengaruh PDRB terhadap IPM bidang pendidikan pada Provinsi Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap kajian pasti akan memperoleh hasil yang diharapkan akan bermanfaat terhadap peneliti juga lembaga atau golongan lain yang memerlukannya. Berikut adalah manfaat yang bisa didapat dalam penelitian/kajian ini adalah:

1. Untuk pengembangan ilmu, harapan dari penelitian ini adalah bisa memberi sumbangsih pandangan agar menjadi bahan juga rekomendasi untuk lembaga yang berwenang membuat keputusan yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.
2. Membagi kegunaan terhadap mahasiswa maupun golongan masyarakat khususnya bagi individu ataupun kelompok yang ingin mendalami ilmu Ekonomi di perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi.

3. Hasil dari kajian ini diharapkan bisa membagi informasi yang bermanfaat berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Provinsi Riau

